

## ■ Korupsi Sarpras Pendidikan Kudus BPK Belum Diminta Audit Kerugian Negara

**PUDAK PAYUNG** – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng menyatakan, belum diminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng untuk mengaudit kerugian negara pada kasus dugaan korupsi bantuan sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004-2005.

Hal itu diungkapkan Kepala BPK Perwakilan Jateng, Ignasius Bambang Adiputranta, saat dikonfirmasi, terkait pernyataan Kejati Jateng yang mengaku penyidikan atas kasus itu terhambat, karena BPK tak mau menghitung.

“Belum ada permintaan audit. Kami belum menerima surat permintaan untuk melakukan penghitungan kerugian negara terhadap kasus itu. Jadi, kami tak bisa disalahkan,” kata Ignasius Bambang Adiputranta kepada wartawan, Minggu (2/3).

Terkait audit kerugian keuangan negara dalam kasus yang menyeret mantan Bupati Kudus, Muhammad Tamzil dan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kabupaten Kudus, Ruslin? BPK menyatakan, tidak akan melakukan audit sebelum ada permintaan.

“Jika sudah ada surat permintaan perhitungan keuangan negara, pasti akan segera kami tindaklanjuti. Sampai hari ini, sepengetahuan kami belum ada surat dari pihak manapun untuk mengaudit kasus itu,” tegasnya lagi.

Penyidikan kasus dugaan korupsi dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar terhambat. Kejati Jateng yang menetapkan Muhamad Tamzil dan Ruslin sebagai tersangka, mengaku kesulitan dalam perhitungan negara. Kejati mengatakan, BPK tidak mau menghitung kerugian negara.

“Kami sudah tetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kasus ini agak lambat, karena BPKP dan BPK tak mau menghitung kerugian negara. Sementara pengawas daerah yang dulu punya data, sekarang tak punya data kerugian negara,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jateng, Masyhudi, sebelumnya.

Hasil kerugian negara terkait perhitungan dari pengawasan internal sendiri, diakui Masyhudi, tidak akurat. Atas hal itu, Kejati mengaku sudah menggelar kasusnya kembali.

“Kami sudah berbicara dengan pihak BPK dan BPKP, tapi belum ada tanggapan. Bawasda Kudus, dia tidak yakin menghitung kasus tahun 2005 tersebut, karena semua pejabat saat itu sudah pindah,” lanjutnya. ■ *rdi-die*